

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



PERJANJIAN KINERJA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ANNA RAHMADIA

Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : HAMSUARDI

Jabatan : BUPATI PASAMAN BARAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI PASAMAN BARAT

HAMSUARDI

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. Hj. ANNA RAHMADIA
Pembina IV/a
NIP 19820927 200805 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	550
II	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	4,7
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,02
III	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	65
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7,5
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,65
IV	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	34
V	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66,25
VI	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	63
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B
		Level Maturitas SPIP	Level 3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	504.850.000	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	146.951.500	DAK
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	20.000.000	APBD
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	44.735.200	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp.	98.033.898	APBD
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	372.408.900	APBD+DAK
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.685.991.797	APBD
8	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	225.954.500	APBD+DAK
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp.	2.539.856.500	APBD+DAK

10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	2.963.332.100	APBD+DAK
	JUMLAH	Rp.	12.602.114.395	

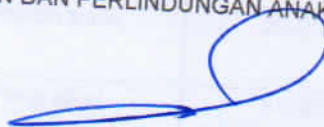
BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

Simpang Empat, Januari 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



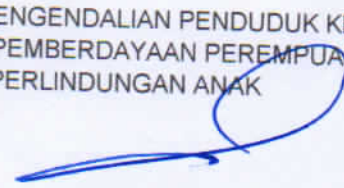
dr. Hj. ANNA RAHMADIA
Pembina IV/a
NIP. 19820927 200805 2 001

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.134.607.125
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	51.606.173
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.502.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.109.900
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.166.599
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	87.995.000
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota	416.855.000
3	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.540.000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	114.400.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.011.500
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.735.200
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaian PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	98.033.898

7	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota	90.410.000
		Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	215.204.400
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	66.794.500
8	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	66.882.500
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	159.072.000
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	796.490.000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	91.200.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.222.416.500
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	429.750.000
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.963.332.100
	JUMLAH ANGGARAN		12.602.114.395

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK


dr. Hj. ANNA RAHMADIA
Pembina IV/a
NIP.19820927 200805 2 001

